

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penanganan pengamen dan pengemis di Kecamatan Bojonegoro dengan menggunakan teori efektivitas Duncan (1973) yang meliputi indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Berdasarkan indikator pencapaian tujuan, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penanganan pengamen dan pengemis di Kecamatan Bojonegoro belum sepenuhnya efektif. Meskipun Satpol PP dan Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai upaya seperti patroli, razia, penertiban, pendataan, serta pembinaan terhadap pengamen dan pengemis, tujuan utama untuk mengurangi jumlah pengamen dan pengemis belum tercapai secara optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya pengamen dan pengemis di berbagai titik keramaian serta meningkatnya jumlah pengamen dan pengemis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pengamen dan pengemis masih menjadi permasalahan sosial yang belum dapat diselesaikan secara menyeluruh. Faktor ekonomi, tidak memiliki pekerjaan tetap, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbatasan

keterampilan menjadi penyebab utama pengamen dan pengemis tetap bertahan melakukan aktivitas di jalanan.

2. Integrasi

Berdasarkan indikator integrasi, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam melaksanakan penertiban, pendataan, pembinaan, dan penanganan pengamen serta pengemis. Selain itu, sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 juga telah dilakukan kepada masyarakat maupun kepada pengamen dan pengemis yang terjaring razia melalui kegiatan pembinaan di shelter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 karena pernah mendapatkan penjelasan dari petugas Satpol PP maupun Dinas Sosial saat mengikuti pembinaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses komunikasi, sosialisasi, dan koordinasi antarinstansi telah berjalan dengan baik sehingga mendukung pelaksanaan kebijakan dalam menjaga ketertiban umum di Kecamatan Bojonegoro.

3. Adaptasi

Berdasarkan indikator adaptasi, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 menunjukkan bahwa Satpol PP dan Dinas Sosial telah mampu menyesuaikan strategi penanganan terhadap peningkatan jumlah pengamen dan pengemis yang terjadi pada waktu-waktu tertentu,

seperti bulan Ramadan, menjelang hari raya, hari libur, dan kegiatan yang menimbulkan keramaian masyarakat. Bentuk adaptasi yang dilakukan berupa peningkatan patroli, pengawasan yang lebih intensif, razia rutin, serta pembinaan terhadap pengamen dan pengemis yang terjaring penertiban. Namun demikian, efektivitas adaptasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari tingginya frekuensi razia yang dialami para informan dengan total 31 kali razia, yang menunjukkan bahwa pengamen dan pengemis masih kembali melakukan aktivitas di jalan meskipun telah mendapatkan pembinaan dan arahan dari pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adaptasi yang dilakukan telah berhasil menjaga ketertiban umum dalam jangka pendek, tetapi belum mampu mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan seseorang menjadi pengamen dan pengemis, terutama faktor ekonomi dan keterbatasan kesempatan kerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penanganan pengamen dan pengemis di Kecamatan Bojonegoro, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu meningkatkan program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan bagi pengamen dan pengemis agar mereka memiliki alternatif pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga tidak kembali beraktivitas di jalan.

2. Bagi Satpol PP dan Dinas Sosial, perlu mempertahankan dan meningkatkan koordinasi, pengawasan, serta pembinaan secara berkelanjutan, khususnya pada waktu-waktu tertentu yang berpotensi meningkatkan jumlah pengamen dan pengemis, seperti bulan Ramadan, hari raya, dan kegiatan keramaian masyarakat.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 dengan tidak memberikan uang kepada pengamen dan pengemis di jalan, sehingga dapat membantu mengurangi keberadaan pengamen dan pengemis di ruang publik serta mendukung terciptanya ketertiban umum di Kecamatan Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita Sari, N. W. D., Laksmi Dewi, A. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2024). Tinjauan terhadap fenomena pengemis online dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(3), 370-375.
- Aprilsesa, T. D., Suasono, E., Aminah, S., & Bunawas. (2023). Politik hukum terhadap masyarakat dilarang memberi uang kepada pengemis (Studi Kasus: Kota Pontianak, Kalimantan Barat). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4477-4486.
- Attahira, C., Rahman, A., & Yustrisia, L. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi. *Volume 01 No. 02, Januari 2022*.
- Bahfiarti, T., Muhammad, R., & Aminuddin. (2019). Kajian penanganan anak gelandangan dan pengemis di Kota Makassar. *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, 1(2), 51-61.
- Bogie, S. (2016). *Research Methods For Business*.
- BPS Jatim. (2020). Persentase Penduduk Perkotaan , 2020. *Bdan Pusat Statistik Jawa Timur*. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzc4IzI=/persentase-penduduk-perkotaan.html>
- BPS Jatim. (2025). Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,61 persen di Jawa Timur. *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*.
- Creswell. (2024). *Research Design Qualitatif Quantitative and Mixed Methods Approaches*.
- Destiani, D. A., Nastia, & Basir, M. A. (2023). Peran Dinas Sosial terhadap penanggulangan anak pengemis di Kota Baubau. *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, 4(3), 555-564.
- Dewi, N. U. K., & Nanda, T. (2025). Implementasi Perda Kota Probolinggo No 6 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. *Jurnal Sospoli Integratif*, 3(5), 84-103.
- Duncan, R. B. (1973). *Multiple Decision-making Structures in Adapting to Environmental Uncertainty: The Impact on Organizational Effectiveness*. *Human Relations*, 26(3), 273–291.
- Fadhilillah, M. H. (2023). *Efektivitas Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur*. 11. <http://eprints.ipdn.ac.id/13642/>
- Farudin, M. (2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja lanjut usia berdasarkan hukum ketenagakerjaan (kasus pengemis online dalam konten mandi lumpur di TikTok). *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 181-191.
- Fernandes, G., Aguirre-Jaimes, A., Contreras-Varela, X., Cocolletzi, E., de Sousa, W. O., Araujo, L., Nunes, B., Angeles, G., Quesada, M., Briones, O., Ceccantini, G., Ornelas, J. F., Stokes, A., Angeles, G., Anthelme, F., Aranda-Delgado, E., Barois, I., Bounous, M., Cruz-Maldonado, N., ... Dipholis, I.

- (2022). PENERAPAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018). *New Phytologist*, 51(1), 2022.
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *partial least squares konsep, teknik dan aplikasi*.
- HAIR, J. F., HULT, J. G. T. M., RINGLE, C. M., & SARSTEDT, M. (2022). *A Primer on PARTIAL LEAST SQUARES STRUCTURAL EQUATION MODELING (PLS-SEM)*.
- Hidayah, F. N., & Warsono. (2023). Resistensi pedagang kaki lima Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro terhadap kebijakan relokasi pemerintah Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Citra Masyarakat Sosiologi*, 8(1), 47-55.
- Kasmarani, Y., Torik, M., & Saputra, R. (2023). Pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap eksploitasi lansia pengemis online. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 7(1), 80-91.
- Lisana, A. S. (2024). *EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (STUDI KASUS: PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) PADA DINAS SOSIAL DI KABUPATEN BOJONEGORO)*. <https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/414/>
- Maryolinda, R., Dedoe, A., & Saputra, P. P. (2021). Strategi penanganan gelandangan pengemis (gepeng) di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(2), 51-61.
- Malik, R. Al. (2021). *EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI WILAYAH KAPUBATEN BOJONEGORO BERDASARKAN PASAL 8 C PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM*. <https://repository.upnjatim.ac.id/3581/>
- Milleniar, V. O., Novianto, D. A., & Lukitasari, R. (2022). Fenomena implikasi hukum terhadap maraknya para lanjut usia menjadi pengemis di Surabaya. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 1-14.
- Miles, M. B. & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Nawi, S., & Badaru, B. (2022). Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(5), 1196–1206.
- Nurma Novita Sari & Yudha Bagus Tunggal Putra. (2024). Pertanggungjawabanpidanapengemis yang dilakukanmelalui live streaming TikTok. *CLEAR: Journal Criminal Law Review*, 2(2), 76-97.
- Suminar, K., Srihadiati, T. (2024). Analisis teori abuse of power terhadap eksploitasianak jalananpenjual bunga di kawasan Blok M Jakarta Selatan. *IKRAITH-HUMANIORA*, 8(2), 262-275.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (2015).
- Pratiwi, N. E., Rahayu, S., & Priyanto, H. (2024). Fungsi pemerintah dalam penanganan pengemis dan pengamen anak di Kecamatan Banyuwangi.

- Jurnal Katarsis (Jurnal Administrasi Publik)*, 1(2), 24-33.
- Pramesty, A. T., Mahpudz, A., & Fitria, R. (2025). Efektivitas Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2019 dalam mengatasi aktivitas pengamen dan pengemis: Perspektif pelaku dan masyarakat. *PRO PATRIA: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik*, 8(2), 130-147.
- Puji Ningtyas , Rispawati , M.Samsul Hadi, Y. (2025). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 11 TAHUN 2015 DALAM PENANGGULANGAN AKTIVITAS MENGEMIS (STUDI DI KELURAHAN KEBUN SARI KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM)*. 5(1), 73–83.
- Purwanti, R. A. (2024). Pengaruh Persepsi Pada Konten Ngemis Online Terhadap Pemberian Gift di Platform Tiktok (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Angkatan 2020-2023). *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 164–173.
- Ramadhan, R. (2024). Stigma dan kapitalisasi kemiskinan: Studi kehidupan sosial komunitas pengemis di Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(3), 161-176.
- Rahmadi, A., Yolanda, M., & Sandy, D. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA PROBOLINGGO (STUDI PEMBERDAYAAN PENGAMEN DAN PENGEMIS) IMPLEMENTATION OF PUBLIC ORDER POLICY IN PROBOLINGGO CITY (STUDY OF EMPOWERMENT OF BUGGERS AND BEGGERS) (Case Study of Empowerment of Singers and Beggars)*. 221.
- Rifai, A. H. (2018). Evaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Rotua Marbun, Yudhanto Satyagraha Adiputra, & Eki Darmawan. (2025). Collaborative Governance Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam Tahun 2023. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 119–144. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1327>.
- Sari, D. Y., & Bakar, A. A. (2020). EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(1), 63–76. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.821>
- Saputra, N. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN*.
- Sena, G. A. M. A. I. G. S. dan I. G. A. W. (2021). *EFEKTIVITAS PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG)*. 9(1), 99–118.
- Steers, R. M. (1980). *Efektivitas organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*.
- Supriyanto, A., & Priyanto. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan

- pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro. *SMIA – Edisi Khusus Tema Kebijakan Publik* (2), 597–608.
- Subagio, D. L., Handoyo, P., & Basir, M. A. (2023). Fungsi sosial lansia pada keluarga miskin: Studi etnometodologi tentang pengemis lansia di Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik. *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, 4(3), 555-575.
- Susi, Anwar Hidayat, & Muhamad Abas. (2024). Implementasi Peran Fungsi dan Kewenangan Satpol PP dalam Penertiban Gelandangan Pengemis Mengenai Tertib Sosial di Kabupaten Karawang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 317–327. <https://doi.org/10.31933/av1d1q74>
- Suminar, K., Srihadiati, T. (2024). Analisis teori abuse of power terhadap eksploitasi anak jalanan penjual bunga di kawasan Blok M Jakarta Selatan. *IKRAITH-HUMANIORA*, 8(2), 262-275.
- Suharyana, I. N. H., Widanti, N. P. T., & Raka, A. A. G. (2022). Implementasi Kebijakan Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 2(1), 1-5.
- Togatorop, D. D. (2017). *PanggungKehidupanPengemis: Strategi Bertahan Hidup Pengemis Perempuan Lansia di Lowokwaru, Malang*. Skripsi, Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.
- Rahmadi, A., Yolanda, M., & Sandy, D. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA PROBOLINGGO (STUDI PEMBERDAYAAN PENGEMIS DAN PENGEMIS) IMPLEMENTATION OF PUBLIC ORDER POLICY IN PROBOLINGGO CITY (STUDY OF EMPOWERMENT OF SINGERS AND BEGGARS) (Case Study of Empowerment of Singers and Beggars)*. 221.
- Zaradiva, A. M., & Megawati, W. (2023). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan (Studi kasus di Dinas Sosial Kota Semarang). *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(3), 854-867.